



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-NOMOR : 386/MENKES/SK/III/2003**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM INTER AGENCY COORDINATING COMMITTEE
PROYEK HEALTH WORK FORCE AND SERVICES**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, utamanya bagi penduduk miskin melalui pengembangan SDM dan pelayanan kesehatan
 - b. Bahwa untuk mempercepat pencapaian butir (a) perlu dikembangkan berbagai upaya terobosan/inovatif baik menyangkut aspek SDM maupun pelayanan kesehatan dengan melibatkan pemerintah daerah serta lintas sektor terkait;
 - c. Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut di atas dilakukan melalui Proyek Health Work Force and Services yang merupakan pinjaman dari Bank Dunia yang akan dilaksanakan di 4 Propinsi: Kalbar, Kaltim, Sumbar dan Jambi yang dianggap cocok untuk digunakan sebagai pendorong percepatan proses reformasi dan desentralisasi SDM dan pelayanan kesehatan.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - b. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 tahun 1999 tentang Pedoman Tugas Pokok Fungsi dan Susunan Organisasi Departemen;
 - f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan R.I.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : TIM Inter Agency Coordinating Committee (IACC) untuk proyek Health Work Force and Services



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kedua : Susunan keanggotaan TIM IACC terdiri dari nama-nama sebagai berikut :

1. Dra. Leila Ratna Komala, MA - sebagai Ketua
Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan,
Bappenas
2. Dr. Gunawan Setiadi – sebagai Sekretaris I
Pusat Kajian Pengembangan Kesehatan, Depkes
3. Drs. Arum Atmawikarta – sebagai Sekretaris II
Direktur Gizi dan Kesehatan Masyarakat, Bappenas
4. Dr. Dadi S. Argadiredja, MPH – sebagai Anggota
Sekretaris Jenderal, Departemen Kesehatan
5. DR. Ir. Sumantri Brodjonegoro – sebagai Anggota
Direktur Jenderal Dikti, Depdiknas
6. Drs. Edi Karsanto – sebagai Anggota
Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan
7. Prof. F. A. Moeloek – sebagai Anggota
Ketua Ikatan Dokter Indonesia
8. Prof. Dr. Azrul Azwar – sebagai Anggota
Dirjen Bina Kesmas, Departemen Kesehatan
9. Dr. Sri Astuti Suparmanto – sebagai Anggota
Dirjen Yanmed, Departemen Kesehatan
10. Dr. Irhamsyah Ratu Bagus, SKM – sebagai Anggota
Kepala Badan PPSDM Kes, Departemen Kesehatan
11. Ketua Kolegium Dokter Indonesia

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2003



MENTERI KESEHATAN 9

Dr. Achmad Sujudi

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta
2. Kepala Bappenas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Anggaran, Depkeu di Jakarta
4. Perwakilan Bank Dunia di Jakarta.
5. Direktur Dana Luar Negeri, Ditjen Anggaran, Depkeu di Jakarta.
6. Deputi Direktur Proyek Kesehatan Propinsi Depkes di Jakarta,
7. Sekretaris Eksekutif Proyek Kesehatan Propinsi Depkes di Jakarta.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

**TERMS OF REFERENCE
INTER AGENCY COORDINATING COMMITTEE
HEALTH WORK FORCE AND SERVICES PROJECT**

Rationale

The Health Work Force and Services is one of the projects designed to support the Health Sector's decentralisation program in four i.e West Sumatera, Jambi, West Kalimantan, and East Kalimantan. The project is under loan agreement with the World Bank and is expected to improve the quality of the health manpower and effectiveness of health clinics for the people.

Conceptually this project can overcome the problems faced at this moment, including increasingly serious nutrition and health status, increasing poverty as a result of economic crisis. Decreasing quality of health services as well as accessibility, limited resources both quality and quantity.

The health Work Force has been designed and covers 3 (three) executing agencies, Ministry of Health (MOH), Ministry of National Education (MONE), and Indonesian Medical Association (IMA) to coordinate the three executing agencies need to set up the coordinating committee namely Inter Agency Coordinating (IACC) chaired by Deputy on Human Resources Development Board whose members are echelon I representatives of implementing agencies.

Objectives

To coordinate the project implementation of 3 (three) executing agencies (MOH, MONE, IMA).

Scope of Work

1. Responsible for Inter Agency Coordinating Committee at national level.
2. Provision of policy guidelines.
3. Ensuring of achievement of project goal.
4. Coordinating with review committee to monitor and review project progress.

The IACC should meet at least twice a year during project implementation.

Organization Structure

- Chairman : Deputy of Human Resources, Bappenas
Secretary I : Chief, Centre for Health Development, MOH
Secretary II : Director of Community Health and Nutrition, Bappenas
Members : 1. Secretary General, MOH
2. Director General of Higher Education, MONE
3. Director general Budgeting, MOF
4. Chairman of Indonesian Medical Association, IMA
5. Chairman of Indonesian Collegiums of Medical Doctor (KDI/KKI)
6. Director General of Community Health, MOH
7. Director General of Medical Care, MOH
8. Chairman of National Board on Health Human Resources, MOH